

ARTIKEL

Kapasitas Berinovasi Penyelenggaraan Desa

*Innovation Capacity of Village Administration*Diajeng Intan Putri Utomo ¹, Nuruni Ika Kusuma Wardhani ²^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya. diajengintanputri@gmail.com OPEN ACCESS

Sitasi: Utomo, D.I.P., & Wardhani, N.I.K. (2025). Kapasitas Berinovasi Penyelenggaraan Desa. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 9(1), 77–91. <https://doi.org/10.21787/mp.9.1.2025.77-91>

Dikirim: 30 Januari 2025

Diterima: 28 April 2025

Diterbitkan: 30 Mei 2025

© Penulis



Artikel ini dilisensikan di bawah lisensi [Creative Commons Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Kata Kunci: Inovasi Sosial, Inovasi Akar Rumput, Pengembangan Masyarakat.

Keywords: Social Innovation, Grassroot Innovation, Local Empowerment.

Abstrak: Kapasitas berinovasi dalam penyelenggaraan desa mencerminkan upaya menjembatani kesejahteraan masyarakat dan transformasi sosial. Penelitian ini mengkaji inovasi dari sisi kelembagaan maupun masyarakat desa, dengan menekankan peran inovasi sosial dan akar rumput dalam pemberdayaan aparatur serta masyarakat lokal. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus kualitatif pada dua desa di Kabupaten Lamongan, yakni Desa Warukulon dan Desa Wanar. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat desa, lembaga kemasyarakatan (LKD), dan unit pelayanan seperti posyandu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas inovasi dari sisi kelembagaan masih terbatas, ditandai dengan pelatihan yang tidak rutin dan bergantung pada instruksi eksternal. Sebaliknya, inovasi di tingkat masyarakat, khususnya melalui Karang Taruna, PKK, dan posyandu, menunjukkan potensi dalam mobilisasi dan pemberdayaan. Desa Warukulon menunjukkan tingkat partisipasi yang lebih tinggi sejak pandemi COVID-19, sedangkan Desa Wanar masih dalam tahap awal revitalisasi partisipasi pemuda. Penelitian ini menekankan pentingnya program pelatihan berkelanjutan, dukungan kelembagaan, dan regenerasi kepemimpinan untuk memperkuat ekosistem inovasi lokal. Temuan ini menyoroti perlunya pendekatan terintegrasi dalam peningkatan kapasitas inovasi desa.

Abstract: *The capacity for innovation in village governance reflects efforts to bridge community welfare and social transformation. This study examines innovation from both institutional and community perspectives, emphasizing the role of social and grassroots innovation in empowering village apparatus and local communities. Employing a qualitative case study approach, the research focuses on two villages in Lamongan Regency: Warukulon and Wanar. Data were collected through interviews with village officials, community-based organizations (LKD), and local service units such as posyandu. The findings indicate that institutional innovation capacity remains limited, as training and development for village officials are irregular and highly dependent on external directives. Conversely, innovation at the grassroots level, particularly through Karang Taruna, PKK, and posyandu, has shown promise in community mobilization and empowerment. Warukulon demonstrates relatively higher community innovation due to active participation since the COVID-19 pandemic, while Wanar is in the early stages of revitalizing youth engagement. This research highlights the need for sustainable training programs, institutional support, and leadership regeneration to strengthen local innovation ecosystems. These findings underline the importance of integrating both top-down and bottom-up approaches in enhancing village innovation capacity.*

1. Pendahuluan

Desa merupakan entitas strategis dalam pembangunan nasional yang membutuhkan kapasitas adaptif untuk menjawab tantangan kesejahteraan dan perubahan sosial. Dalam konteks ini, inovasi desa menjadi instrumen penting untuk memperkuat tata kelola dan partisipasi masyarakat. Namun, kapasitas inovasi penyelenggara desa di Indonesia masih menghadapi berbagai keterbatasan, seperti rendahnya pelatihan, minimnya kolaborasi, dan ketergantungan pada instruksi dari pemerintah di atasnya. Berdasarkan data IDM (Indeks Desa Membangun) di tahun 2021 di Kabupaten Lamongan, terdapat 34 desa berstatus mandiri, 157 desa maju dan 271 desa berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak desa yang belum mampu berinovasi untuk peningkatan kesejahteraan. Desa Warukulon dan Desa Wanar, menunjukkan adanya inisiatif untuk menghadirkan inovasi berbasis sosial dan partisipatif, meskipun belum sepenuhnya terdokumentasi dan terstruktur dalam kerangka kelembagaan yang mapan. Di sisi lain, masih banyak desa di Lamongan yang mengalami stagnasi inovasi karena pola kepemimpinan administratif yang kaku dan ketergantungan pada arahan

Beberapa penelitian sebelumnya menyoroti pentingnya inovasi sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Moridu et al., 2023; Rahmawati, 2020), serta inovasi akar rumput dalam pengelolaan sumber daya lokal (Wibowo et al., 2021). Namun, kajian-kajian tersebut umumnya berfokus pada masyarakat secara umum dan belum banyak menelusuri integrasi kedua pendekatan inovasi ini dalam konteks kelembagaan desa.

Penelitian sebelumnya kurang menyoroti akan penggunaan inovasi sosial dan akar rumput bersamaan. Pembaharuan terdapat pada penggalian potensi dari dua aspek yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat di wilayah desa terutama di Lamongan. Selain itu, bertujuan untuk mengkaji penggunaan kedua aspek inovasi tersebut sebagai landasan dalam pemberdayaan masyarakat melalui perangkat penyelenggara desa.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di Desa Warukulon dan Desa Wanar. Dua desa ini dipilih untuk dikaji sejauh mana inovasi lokal yang berkembang dalam kategori desa yang belum mandiri.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan narasumber terkait Teknik pemilihan informan dilakukan secara *purposive* sesuai dengan kriteria, keterlibatan langsung, dan kebutuhan.

Table 1. Data narasumber

Narasumber	Umur	Jenis kelamin	Jumlah
Aparatur Desa	30-50 tahun	Wanita/Laki-laki	2 Orang tiap desa
Karang Taruna	20-23 tahun	Wanita/Laki-laki	1 Orang tiap desa
Anggota PKK	30-50 tahun	Wanita	1 Orang tiap desa
Kader posyandu	25-30 tahun	Wanita	1 Orang tiap desa

Sumber: Data Penelitian Diolah, 2024

Data yang diperoleh akan melalui proses reduksi, perangkuman dan penyortiran dengan poin utama. Kemudian, data akan di visualisasi agar dapat lebih mudah dipahami. Terakhir, data tersebut akan dituangkan dalam penulisan setelah keseluruhan proses telah dilaksanakan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Inovasi Dalam Sisi Lembaga Pemerintahan

3.1.1. Pengembangan SDM

Salah satu bentuk peningkatan kapasitas bagi aparatur desa adalah melalui pelatihan, pendampingan, maupun bimbingan teknis yang dilakukan secara berkala. Dari pelatihan yang dilaksanakan, maka akan terjadi peningkatan kemampuan, wawasan, dan keterampilan bagi aparatur desa. Dalam proses peningkatan kapasitas ini butuh dilakukan secara terus menerus. Hasil dari kontinuitas yang dilakukan selama menjalankan proses peningkatan kapasitas akan lebih terlihat hasilnya. Bentuk dari hasil peningkatan kapasitas ini dapat dijangkau dalam waktu yang cepat dengan rentang pemahaman akan regulasi dan tata kelola desa (Putra & Iskandar, 2013). Sementara itu, apabila dilakukan tidak secara rutin tentu akan berbeda hasil dan dapat beresiko menimbulkan lambatnya perkembangan dan semakin menghambat kedepannya (Dwihastari, 2019).

Penuturan dari kedua narasumber menjelaskan bahwa pelatihan untuk meningkatkan kapasitas diri aparatur sebagai lembaga yang melakukan pelayanan secara langsung sangat kurang. Aparatur desa minim perhatian terkait dengan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dirinya. Akibat minimnya pelatihan ini menjadikan jumlah aparatur desa dengan kapasitas atau kemampuan yang mumpuni untuk menjalankan tata kelola pemerintahan masih tergolong minim bahkan kurang.

“Jadi memang dari saya yang pertama, paling tidak ada suratlah. Instruksi resmi dari pusat untuk setiap desa ini melaksanakan program. Jadi kalau nanti sudah ada surat itu kan sifatnya wajib mau tidak mau desa kan harus melaksanakan.” (Desa Warukulon)

“Seluruh program yang kami lakukan itu menunggu instruksi dari atas.” (Desa Wanar)

Pelaksanaan pelatihan aparatur di Desa Warukulon dan Wanar umumnya bersifat bergantung pada arahan struktural dari tingkat kecamatan atau kabupaten. Keterlibatan terbatas pada perangkat inti, sementara inisiatif lokal masih rendah, sehingga menimbulkan kesenjangan kompetensi yang memengaruhi efektivitas pelayanan publik (Judjianto et al., 2023).

3.1.2. Dukungan pemerintah desa terhadap inovasi untuk Lembaga pemerintahan

Berbagai bentuk dukungan yang dilakukan oleh pemerintah desa sebagai bentuk upaya meningkatkan inovasi (Astuti, 2017). Dukungan pemerintah desa memiliki peran sentral dalam menggerakkan inovasi di tingkat lokal (Kushadajani & Permana, 2020; Yang & Wu, 2022). Pemerintah desa menunjukkan upaya dalam meningkatkan keinginan dan kemauan aparatur desa untuk melakukan kegiatan yang menyokong inovasi dalam lembaga pemerintahan desa.

“Dukungan kades itu, apa? Jadi ketika kegiatan itu dianggarkan dan dimasukkan APBDes itu sudah termasuk dukungan dari kepala desa.” (Desa Warukulon)

“Kalo dari pemerintahan desa ini sendiri sangat mendukung adanya pelatihan-pelatihan, adanya perencanaan-perencanaan seperti itu. Jadi kalo ada kegiatan apa diluar, itu pasti ada dari perangkat desa yang diikutkan.” (Desa Wanar)

Dukungan pemerintah desa di Warukulon dan Wanar tercermin melalui alokasi APBDes dan partisipasi dalam pelatihan aparatur. Namun, dukungan tersebut masih terbatas pada aspek administratif dan belum menyentuh dimensi inovasi sosial yang berbasis kolaborasi dan pemberdayaan masyarakat.

3.1.3. Hambatan dalam pelaksanaan inovasi

Pelaksanaan inovasi sosial banyak memiliki hambatan yang beraneka ragam. Hambatan yang hadir terutama dalam kelembagaan banyak bersumber dari internal organisasi. Hambatan yang menjadi batu besar dalam inovasi sosial didominasi oleh permasalahan mengenai sumber daya manusianya sendiri (Abdolhosseinzadeh et al., 2023).

“Jadi untuk desa warukulon ini jumlah perangkatnya kan masih minim, *mbak*. Jadi terkait dengan itu, kita fokus *ngisi* perangkat dulu lah.” (Desa Warukulon)

“Mungkin kalau seperti itu, tantangannya klasik. Kalau di desa wanar kecamatan pucuk ini dari perangkatnya yang udah sepuh.” (Desa Wanar)

Desa Warukulon menghadapi kekosongan enam jabatan, sehingga hanya dua aparatur menangani seluruh administrasi. Ketergantungan pada instruksi pusat menghambat inisiatif lokal. Sementara itu, Desa Wanar terkendala usia lanjut perangkat desa dan minimnya pelatihan, yang membatasi kapasitas inovasi sosial.

3.2. Inovasi dari Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Karang Taruna

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) memiliki peranan penting dalam pemberdayaan masyarakat desa. Adanya Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai mitra pemerintah desa hadir untuk memastikan masyarakat terus dapat berperan aktif dalam pembangunan desa sesuai kebutuhan masyarakat. Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 menyebutkan tugas-tugas utama dari Lembaga Kemasyarakatan Desa meliputi: (1) Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif; (2) Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif; (3) Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong-royong dan swadaya masyarakat; (4) Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat.

3.2.1. Kegiatan LKD Karang Taruna di Desa

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di desa dirancang untuk mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan (Meidityas & Sumaryana, 2024). Kegiatan yang ada dibuat untuk menjangkau keaktifan masyarakat dari tiap generasi.

“Tapi sebenarnya Karang Taruna Desa Wanar itu baru terbentuk tahun kemarin. Jadi kan lama kosong.” (Desa Wanar)

“Kalau kartar di waru nggak *neko-neko* soal kegiatan. Kalau untuk acara-acara sendiri sih kita ga pernah sih acara langsung besar, pasti acara kecil-kecil sih.” (Desa Warukulon)

Salah satu bagian dari LKD adalah Karang Taruna. Karang Taruna dibentuk untuk mawadahi aspirasi generasi muda. Dengan adanya Karang Taruna sebagai wadah, generasi muda dapat bereksplorasi dan berinovasi di kegiatan kemasyarakatan (Ramli & Kusmaryani, 2024). Namun, dua Desa menunjukkan perbedaan yang signifikan. Karang Taruna Desa Wanar baru terbentuk tahun lalu dari keinginan Pemerintah Desa Wanar untuk menyatukan generasi muda dari 3 Dusun (Dusun Wanar, Dusun Badu, dan Dusun Tulung) di Desa Wanar. Sementara itu Karang Taruna Desa Warukulon terus aktif sejak covid meskipun dengan kegiatan skala kecil.

“Aktif ya kalau agustus cuma kegiatannya ya mengadakan lomba-lomba gitu aja. Mungkin untuk pemberdayaan, pelatihan dan lain-lain itu belum.” (Desa Wanar)

Karang Taruna Desa Wanar menunjukkan awal partisipasi melalui kegiatan peringatan kemerdekaan, meskipun pelaksanaan program pelatihan keterampilan masih terhambat oleh rendahnya keterlibatan anggota. Sebaliknya, Karang Taruna Desa Warukulon telah menunjukkan aktivitas yang konsisten sejak masa pandemi COVID-19.

“Iya, baru aktif saat pandemi soalnya kan dari pihak pemerintah desa sama panitia covid itu kan meminta bantuan kita untuk mengkoordinir mengenai disinfektan yang ada di pos-pos.” (Desa Warukulon)

Karang Taruna Desa Warukulon mulai aktif sejak keterlibatannya sebagai sukarelawan Satgas COVID-19. Aktivitas tersebut mendorong partisipasi lanjutan melalui berbagai kegiatan sosial, seperti santunan anak yatim, arisan, dan perayaan hari kemerdekaan.

“Untuk kegiatan-kegiatan kita sendiri tuh kita banyak menerima masukan dari anggota-anggota atau warga kayak misalnya ada kegiatan apa gitu. Untuk acara kita itu menimbang dulu acaranya itu cocok.” (Desa Warukulon)

Kegiatan berasal dari usulan anggota atau masyarakat, yang akan dikaji oleh pengurus harian Karang Taruna, sebelum dibahas bersama anggota lainnya untuk membentuk kepanitiaan. Dengan kegiatan yang bersumber dari kebutuhan internal akan membentuk pribadian yang terampil, bertanggung jawab dan inovatif (Suprayoga & Mardiana, 2023).

3.2.2. Inovasi Karang Taruna Desa

Karang Taruna dibentuk untuk memwadahi ide-ide baru dari generasi muda dalam kegiatan kemasyarakatan (Yendra, 2022). Ide-ide baru tersebut tentunya merujuk pada inovasi baru dalam kegiatan yang diadakan oleh Karang Taruna. Karang Taruna di Desa Wanar masih belum dapat melakukan inovasi disebabkan karena organisasi baru dibentuk. Namun, terdapat beberapa rencana kegiatan inovatif yang tengah dirancang untuk terealisasi.

“Kemarin gini jadi kebetulan di Desa Wanar itu kan banyak, bukan menganggur tapi berputar di satu tempat saja (bidang pekerjaannya).” (Desa Wanar)

Kegiatan ini sebagai respons atas kekhawatiran Pemerintah Desa terhadap ketergantungan pemuda pada bisnis yang tidak stabil, seperti tren tanaman hias bonsai di Desa Wanar. Pemerintah Desa mendorong diversifikasi keterampilan pemuda melalui pelatihan untuk memperluas peluang pekerjaan. Selain itu, Karang Taruna Desa Warukulon telah memiliki rekam jejak dalam menginisiasi kegiatan inovatif dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif.

“Menurutku kegiatan yang paling inovatif ya tadi santunan anak yatim itu tadi karena kan pemuda-pemudi *chanel* nya kan hanya temen-temen kita se-rekan atau nggak gitu mengandalkan sponsor nggak mungkin karena dalam skala desa...” (Desa Warukulon)

Partisipasi masyarakat terlihat dari donasi yang diberikan untuk menyantuni anak yatim-piatu di Desa Warukulon. Dari donasi ini Karang Taruna Desa Warukulon berusaha meningkatkan rasa sosial sekaligus empati masyarakat kepada anak-anak yang membutuhkan di Desa. Selain santunan anak yatim-piatu, Karang Taruna Desa Warukulon juga mengadakan kegiatan Inovatif lainnya yakni donor darah.

“Terus ada kegiatan kita yang kerjasama dengan PMI atas nama Karang Taruna dan Bu Mamik dari As-Syifa (Klinik) dalam kegiatan Karang Taruna yang diadakan di Desa Warukulon. Alhamdulillah acaranya berjalan lancar dan sukses.” (Desa Warukulon)

Kegiatan donor darah ini mengajak masyarakat untuk turut serta dalam kegiatan kemanusiaan. Dari kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa empati antara sesama manusia yang membutuhkan.

3.2.3. Dukungan dan hambatan

“Sebenarnya ya mbak kartar Desa Wanar aktif itu pun berkat kemauan Pemerintah Desa untuk membangkitkan Karang Taruna desa...” (Desa Wanar)

Pemerintah Desa Wanar ambil peran dalam perumusan kegiatan Karang Taruna akibat pasifnya anggota. Keterlibatan Pemerintah Desa dalam upaya revitalisasi Karang Taruna disebabkan oleh rendahnya partisipasi anggota dan pengurus harian. Intervensi ini mencerminkan komitmen pemerintah, dan dorongan keterlibatan aktif pemuda dalam kegiatan sosial sekaligus memperbaiki masalah yang ada (Riyanto & Kovalenko, 2023; Susu et al., 2024). Selain itu, Pemerintah Desa Warukulon memberikan dukungan konkret berupa pendanaan dan sumber daya manusia guna memperkuat kapasitas organisasi Karang Taruna.

“Dan organisasi kayak kita itu butuh banget *support* Pemdes. Karena kita kan di naungi Pemdes ya jadi butuh sekali dukungan Pemdes. Dengan adanya *support* dari Pemdes kan juga jadinya berpengaruh ke masyarakat desa.” (Desa Warukulon)

Pemerintah Desa maupun Karang Taruna menyadari peran masing-masing sebagai sebuah sinergi yang utuh. pemerintah desa memahami pentingnya dukungan serta perannya sebagai pemangku kepentingan tertinggi di desa untuk memberdayakan masyarakat melalui insan-insan muda. Unjuk sertanya dalam kegiatan Karang Taruna, menjadi panutan sekaligus contoh yang baik di masyarakat.

Hambatan dari kedua Karang Taruna Desa Wanar maupun Warukulon mengarah pada hal yang sama. Titik temu pembahasan hambatan berada pada kesibukan masing-masing anggota. Selain itu, perihal pekerjaan dan karakteristik pribadi juga menjadi faktor penghambat dalam berinovasi Karang Taruna.

“Memang dari Desa Wanar kan terdiri dari 3 dusun ya. Nah, itu dari itu susah sih kalau diajak jalan bareng itu gak bisa. Struktur anggota sendiri itu terdiri dari Ketua dari Wanar, Sekretaris dari Badu, Bendahara dri Tulung. Untuk jalan bareng itu susah. *Soale* kan sudah beda karakter.” (Desa Wanar)

Integrasi Karang Taruna dari tingkat dusun ke desa menghadapi tantangan signifikan akibat perbedaan karakteristik masyarakat antar-dusun serta kebiasaan masyarakat yang masih berorientasi sistem dusun. Hambatan struktural ini diperparah kesibukan anggota dan pengurus harian yang memasuki usia produktif, termasuk banyaknya perantau, sehingga mengurangi kapasitas kelembagaan dalam pengembangan dan inovasi program. Kondisi serupa dialami Karang Taruna Desa Warukulon, di mana dinamika tersebut menghambat perencanaan dan formulasi kegiatan secara efektif. Karang Taruna Desa Warukulon dan Desa Wanar menyadari bahwa diperlukan partisipasi aktif anggota organisasi dalam perumusan kegiatan yang akan dilaksanakan. Ajang diskusi mengenai kegiatan menjadi lebih sulit untuk dilakukan.

“Makanya salah satu faktor kan kenapa nggak jalan, mungkin karena faktor pekerjaannya. Mungkin ini nanti setahun dua tahun ini mungkin ada usulan gitu loh mbak, dan pembentukan ketua yang baru nanti.” (Desa Wanar)

“Tapi semakin kesini sudah pada sibuk semua, sekarang juga waktunya regenerasi kepemimpinan sih.” (Desa Warukulon)

Menurut kedua Karang Taruna, solusi yang tepat untuk mengatasi hambatan yang ada adalah dengan melakukan regenerasi. Dari regenerasi, anggota baru dengan kesibukan yang masih tidak terlalu padat dapat melanjutkan Karang Taruna.

3.2.4. Harapan Karang Taruna Di Masa Mendatang

“Kita tidak membutuhkan yang mumpuni melainkan yang mau menggerakkan Karang Taruna Desa Wanar. Kalau yang mumpuni banyak tapi yang mau menggerakkan ini yang susah.” (Desa Wanar)

Karang Taruna Desa Wanar berharap pergantian periode mendatang membawa perubahan positif, dengan peningkatan aktivitas, inovasi, dan kontribusi bagi masyarakat. Ketua baru diharapkan dapat memotivasi anggota untuk berpartisipasi lebih aktif.

“Dan kita juga mau kegiatan berupa seminar dan pelatihan-pelatihan begitu. Kegiatan untuk masyarakat desa jadi ibu-ibu yang mau dapat ilmu atau mau dapat pelatihan keterampilan bakal terealisasi dari pelatihan ataupun seminar yang kita adain.” (Desa Warukulon)

Karang Taruna Desa Warukulon berkomitmen untuk mengembangkan program pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi kaum ibu, dengan dampak yang langsung terasa oleh masyarakat.

3.3. Inovasi dari LKD PKK dan Posyandu di Desa

PKK dan Posyandu memiliki peran berbeda dalam pemberdayaan ibu-ibu di desa. PKK fokus pada kegiatan pemberdayaan, sedangkan Posyandu berperan dalam penyuluhan kesehatan bulanan. Data yang diperoleh penulis melalui wawancara dengan anggota PKK Desa Wanar dan Kader Posyandu Desa Warukulon.

“PKK Desa Wanar ini selama beberapa periode yang saya ikuti itu memang tujuan pertamanya memberdayakan ibu-ibu di Desa Wanar terutama yang berkecimpung di keluarga dan masyarakat jadi perannya ibu itu dioptimalkan semampunya untuk kesejahteraan di masyarakat.” (Desa Wanar)

PKK Desa Wanar berfungsi sebagai wadah pemberdayaan perempuan melalui beragam kegiatan yang dilaksanakan setiap bulan, termasuk program penanaman bibit cabai, terong, dan tomat di pekarangan rumah pada tanggal 6 tiap bulannya. Kegiatan ini tidak hanya memanfaatkan lahan kosong tetapi juga meningkatkan keterampilan anggota sekaligus menjadikan pasokan pangan desa lebih higienis dan sehat melalui hasil kebun mandiri.

Kegiatan rutin bulanan Posyandu di Desa Warukulon berfokus pada penjaan kesehatan masyarakat. Posyandu Desa warukulon dibagi menjadi 3 pos Kader dalam pelaksanaan untuk efisiensi pekerjaan.

“Pelayanannya seperti penimbangan, pengukuran, menu gizi. Memang selalu ada bidannya untuk penimbangan dan menu gizi sebagai pengawas dan imunisasi.” (Desa Warukulon)

Kegiatan Posyandu berfokus pada layanan kesehatan rutin meliputi penimbangan, pengukuran, dan penyediaan menu gizi sesuai kebutuhan, yang mencakup tidak hanya balita tetapi juga remaja putri (rematri) dan lansia di desa.

3.3.1. Kegiatan Inovasi PKK dan Posyandu

PKK Desa Wanar memiliki kemampuan inovasi yang baik, salah satunya melalui program *green house* untuk memberdayakan ibu-ibu dan masyarakat desa.

“Pernah ada program dulu, program ini kayak *green house* itu. Itu juga dulu itu desa yang mendapatkan program seperti itu tapi yang bekerja itu justru ibu-ibu PKK semuanya. Kebetulan *green house*-nya itu adalah tanaman-tanaman yang dibutuhkan ibu-ibu jadi bukan tanaman hias.” (Desa Wanar)

Program *green house* diadakan dalam kurun 2 bulan. Pemilihan jenis tanaman yang akan ditanam terbagi menjadi 2 kategori, yakni tanaman hias dan tanaman hidup (sayur mayur). Tanaman hias berupa bonsai untuk dirawat oleh Karang Taruna dan masyarakat Desa sekaligus ibu-ibu PKK pada perawatan tanaman sayur-mayur untuk menunjang kebutuhan pokok.

“Untuk sementara ini inovasinya yang sudah dilaksanakan itu program kerja dari pokja kemudian ketika ada sharing di rapat PKK ada anggota PKK yang *curhat-curhatan* itu, kita mengatur solusi bagaimana caranya agar permasalahan ibu-ibu itu bisa terselesaikan.” (Desa Wanar)

PKK Desa Wanar berinovasi melalui program *green house* guna memberdayakan ibu-ibu dan masyarakat desa. Sementara itu, dari Posyandu Desa Waru memiliki inovasi dalam ranah gizi balita. Inovasi ini dilakukan sebagai salah satu metode pencegahan stunting di masyarakat. Inovasi gizi ini tertuang dalam program “Piring Sehat” yang mana balita maupun anak-anak tetap mendapatkan gizi dengan porsi yang seimbang dengan kreasi makanan yang menarik.

“Kan, ada menu “Piring Sehat” nah disana biasanya ada inovasinya, cara anak kita biar tidak terkena stunting atau gizi buruk. Seringnya ya disitu untuk pencegahan stunting.” (Desa Warukulon)

Dengan adanya inovasi pada makanan yang diberikan kepada balita dan anak-anak di Desa dapat menurunkan angka stunting di Desa Warukulon. Menurunnya angka stunting di Desa akan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusianya di masa mendatang nantinya (Rahmadhita, 2020).

3.3.2. Peran Inovasi PKK di Desa Wanar

Kegiatan PKK yang diikuti oleh ibu-ibu di Desa Wanar menunjukkan banyak terobosan baru yang inspiratif dan solutif. Sebagai contoh inovasi yang dilakukan seperti inovasi di masakan, pelatihan keterampilan, dan *tips* tentang kerumahtanggaan.

“Iya, alhamdulillah ibu-ibu PKK pun semangat. Ya, mereka ini punya gagasan-gagasan baru ketika dikasih tugas. Untuk berbagi ilmu, mereka punya banyak inovasi lah...” (Desa Wanar)

Inovasi ini bertujuan memberdayakan masyarakat, khususnya wanita di Desa Wanar, sesuai tujuan PKK. Partisipasi dalam kegiatan inovatif diharapkan dapat menunjukkan peran penting wanita dalam mensejahterakan masyarakat (Eid et al., 2023). Tak hanya dalam aktivitas sehari-hari, inovasi juga terlihat dalam perayaan kemerdekaan setiap Agustus. Ibu-ibu PKK turut memeriahkan acara sekaligus menginspirasi masyarakat melalui partisipasi dalam berbagai lomba.

“Jadi kalau agustusan selain kartar mengadakan lomba-lomba ibu PKK juga mengadakan lomba-lomba tujuannya untuk memberikan semangat untuk memperingati hari kemerdekaan, biar ibu-ibu itu selain membuat inovasi di dalam rumah inovasi di masyarakatnya itu juga ada.” (Desa Wanar)

Selain memeriahkan ibu-ibu PKK juga mengikuti lomba ragam kreatif. Lomba ini bermanfaat untuk mengasah kreatifitas dan keterampilan ibu-ibu tak hanya dari PKK tetapi juga ibu-ibu lainnya di luar PKK.

“Jadi seperti ini ketika ibu-ibu PKK ini untuk mendapatkan ilmu mereka mendapatkan ilmu dari kegiatan PKK, baik kegiatan PKK baik berupa kegiatan fisik seperti lomba-lomba itu tadi atau ketika rapat..” (Desa Wanar)

Dengan aktif selama kegiatan lomba, ibu-ibu PKK mampu menambahkan wawasan, ilmu baru, dan menginspirasi ibu-ibu lain di Desa Wanar. Penambahan ilmu pun tidak terbatas pada dalam kegiatan PKK saja melainkan juga di luar PKK. Peran dari inovasi juga dilakukan oleh Posyandu di Desa Warukulon untuk mengajak masyarakat Desa menerapkan pola hidup sehat. Sebagai garda terdepan, Posyandu di Desa Warukulon memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesehatan masyarakat melalui sosialisasi rutin yang dilakukan ke masyarakat (Tse et al., 2017).

“Posyandu menjadi tombak terdepan untuk kesehatan masyarakat. Maksudnya itu kan tombak menyampaikan pentingnya kesehatan masyarakat kan melalui Posyandu...” (Desa Warukulon)

Program Posyandu di Desa Warukulon tergolong lengkap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari segala lapisan. Posyandu terdiri dari 3 jenis yakni untuk kesehatan balita, kesehatan remaja putri, dan lansia di Desa.

“Kita kan bertanggung jawab, semampu kita memberikan pelayanan terbaik semampu kita. Jadi bagaimana kita ini mengajak, merayu masyarakat biar mau datang ke Posyandu untuk kesehatan masyarakat sebaik mungkin.” (Desa Warukulon)

3.3.3. Hambatan dalam melaksanakan PKK dan Posyandu

Dalam prosesnya, inovasi yang dilakukan oleh PKK maupun Posyandu menemui beberapa hambatan. Hambatan-hambatan ini menyulitkan PKK dan Posyandu selama program berlangsung.

“Sebenarnya untuk ibu-ibu PKK ini membutuhkan biaya, anggaran dana. Walaupun ada tapi kurang maksimal untuk ibu-ibu PKK karena yang dijangkau ibu-ibu PKK ini tidak hanya keluarga dan lingkungan sekitar...” (Desa Wanar)

“Kalau pelatihan keterampilan infrastrukturnya pinjem dulu ke anggota PKK yang punya peralatannya.” (Desa Wanar)

PKK melihat keterbatasan anggaran menjadi salah satu hambatan tersendiri yang cukup menyulitkan. Kebutuhan anggaran dana operasional membatasi sarana kreatifitas masyarakat (Wadu et al., 2018). Ibu-ibu PKK kesulitan mengikuti pelatihan, salah satunya menjahit yang disebabkan oleh kurangnya dana untuk membayar tutor dan membeli alat jahit. Oleh karena itu, dibutuhkan anggaran yang mumpuni untuk menunjang kegiatan PKK.

“Kemudian sumber daya manusianya, sebenarnya ibu-ibu PKK itu pinter-pinter loh, punya apa ya, ketika mereka itu ditunjuk mereka itu bisa kreatif begitu loh. Ini yang harus dipupuk. Karena dengan dipupuk itu tadi dan difasilitasi usahanya akan bisa.” (Desa Wanar)

Posyandu di Desa Warukulon memiliki pandangan hambatan yang berbeda. Kader Posyandu kerap kali perlu memutar otak mengenai cara mengajak masyarakatnya untuk aktif memeriksakan kesehatan secara rutin di poyandu. Memberikan pelayanan yang ramah dan menyenangkan merupakan solusi yang diterapkan oleh Posyandu untuk mengatasi hambatan yang ada.

“Biasanya yang ibu-ibu muda semangat untuk datang, dan meskipun kader Posyandu tua-tua tapi pintar merayu jadi mbah-mbah pun banyak yang datang ke Posyandu malah senang mereka ke Posyandu...” (Desa Warukulon)

“Iya masyarakat masih semangat untuk ke Posyandu tapi untuk rematrinya agak susah karena kan ada yang kerja, sekolah, susahnyanya disitu. Sebetulnya kalau ada orangnya aman aja. Soale kalau jam sekolah kan pasti gak bisa hadir kadang ada yang kerja juga itu juga gak bisa hadir.” (Desa Warukulon)

Namun, solusi pelayanan yang ramah masih belum berhasil pada Posyandu rematri yang berfokus pada remaja. Hambatan terbesar di lapangan mengenai Posyandu ini adalah waktu diadakan Posyandu bertabrakan dengan waktu sekolah maupun waktu kerja remaja.

3.4. Implikasi Teori

3.4.1. Inovasi sosial dan Inovasi akar rumput

Penyelenggara desa yang ada di desa sesuai Permendagri nomor 18 tahun 2018 terdiri dari Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di prakarsai oleh pemerintah desa, untuk mewadahi partisipasi masyarakat, mitra pemerintah desa yang turut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat desa. Inovasi yang dibahas dalam sub hasil banyak berkecimpung pada pemberdayaan dan pengembangan masyarakat di Desa. Secara harfiah, inovasi erat kaitannya dengan pembaharuan mengenai suatu hal yang jauh berbeda dari sebelumnya (Cohen & Levinthal, 1990). Inovasi dapat di definisikan sebagai sebuah produk atau proses baru maupun kombinasi keduanya yang berbeda secara signifikan dari produk atau proses sebelumnya dan tersedia untuk digunakan secara potensial (Portales, 2019). Inovasi perlu turut dilakukan secara berlanjut untuk memastikan permasalahan yang ada di masyarakat dapat di tangani lebih lanjut melalui inovasi yang ada dengan melibatkan masyarakat dan lembaga pemerintah desa. Inovasi tersebut dinamakan inovasi sosial.

Inovasi sosial menurut *The Young Foundation* adalah solusi baru yang ditawarkan untuk memuaskan kebutuhan sosial, menciptakan hubungan yang baru, dan menjadikan aset sumber daya manusia menjadi lebih baik. Menurut Vercher (2022) inovasi sosial memberikan ruang untuk masyarakat lokal mengatasi secara mandiri memenuhi kebutuhan maupun peluang sosial. Masyarakat diajak untuk mendalami pentingnya inovasi dalam kehidupan sosial sehari-hari. Inovasi sosial memiliki 4 elemen fokus utama yakni pemenuhan kebutuhan, solusi inovatif, perubahan struktur sosial dan hubungan, peningkatan kapasitas masyarakat dalam bertindak (Portales, 2019). Tiap elemen memiliki masing-masing arah tujuan pembahasan.

Keempat elemen inovasi sosial ini saling terkait secara sistematis. Pertama, pemenuhan kebutuhan (*Satisfaction of a need*) menjadi dasar dengan menganalisis kesesuaian solusi dengan kebutuhan lokal. Kedua, solusi inovatif (*innovation of the solution*) menekankan pada pembaruan melalui terobosan atau adaptasi kreatif. Ketiga, perubahan struktur sosial (*change of social structures and relationship*) terjadi ketika inovasi melibatkan aktor baru yang mengubah dinamika masyarakat. Terakhir, peningkatan kapasitas masyarakat (*increase of society's capacity to act*) dicapai melalui pendampingan aktor pemberdayaan untuk memperkuat kemandirian komunitas (Grice et al., 2012). Temuan wawancara menunjukkan baik aparat desa maupun LKD memiliki motivasi kuat untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dalam inovasi mereka.



Gambar 1. Elemen Inovasi Sosial.

Sumber: *the young foundation (2019)*

Aparatur di Desa Wanar dan Warukulon memerlukan inovasi guna meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan publik. Meskipun keempat elemen inovasi sosial hampir terpenuhi, implementasinya terkendala oleh keterbatasan kapasitas SDM dalam merancang solusi inovatif.

Aparatur di kedua desa menghadapi tantangan inovasi dengan karakteristik berbeda. Di Desa Wanar, inovasi terhambat oleh fokus berlebihan pada pelayanan rutin, pelatihan terbatas untuk bagian tertentu, serta dominasi SDM lansia yang kurang adaptif. Sementara di Desa Warukulon terkendala jumlah aparatur yang minim dan kualitas SDM belum memadai, meski memiliki dukungan anggaran. Persoalan mendasar kedua desa terletak pada kualitas SDM - mencakup kapasitas, usia, dan motivasi - yang lebih krusial daripada ketersediaan dana dalam mendorong inovasi.

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)—termasuk Karang Taruna, PKK, dan Posyandu—juga berupaya menerapkan inovasi sosial dengan tujuan memberdayakan masyarakat. Sejalan dengan teori (Caridà et al., 2022), inovasi sosial dirancang untuk implementasi langsung melalui ide-ide praktis, sebagaimana terlihat dalam praktik LKD di Desa Wanar dan Warukulon.

Kontras perkembangan inovasi terlihat antara Desa Wanar dan Warukulon: di Desa Wanar, Karang Taruna masih terkendala organisasi baru dan integrasi antar-dusun sehingga membutuhkan pendampingan Kepala Desa, sementara PKK-nya telah sukses menjalankan program green house dan pelatihan keterampilan meski terbatas anggaran. Sebaliknya di Desa Warukulon, Karang Taruna justru lebih aktif dengan kegiatan *fundraising* dan donor darah, sedangkan Posyandu fokus pada inovasi pelayanan dasar seperti 'Piring Sehat' tanpa banyak inovasi sosial. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kapasitas inovasi lembaga desa dipengaruhi oleh kematangan organisasi, dukungan pemerintah desa, dan karakteristik masyarakat setempat

Inovasi akar rumput merupakan suatu solusi alternatif yang bersumber dari kebutuhan lokal yang sesuai dengan nilai adat setempat namun tetap menjawab permasalahan yang ada (Maldonado-Mariscal, 2023). Menurut Seyfang & Smith dalam (Smith & Stirling, 2018) menjelaskan definisi inovasi akar rumput yakni seluruh lapisan masyarakat di suatu tempat bekerjasama dalam menghasilkan solusi yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Selain solusi yang berasal dari masyarakat, kontribusi dalam kegiatannya juga membutuhkan peran serta masyarakat (Gupta et al., 2003).

Kelembagaan di kedua desa masih belum dapat menerapkan inovasi akar rumput. Keterbatasan dari adanya inovasi ini berakar dari kualitas sumber daya aparatur desa yang belum memadai untuk melakukan inovasi. Tingkat kualitas sumber daya aparatur

yang tergolong rendah berakar dari minimnya pelatihan dan pengembangan diri yang didapatkan. Aparatur desa di kedua lokasi penelitian menghadapi keterbatasan serupa dalam pengembangan inovasi. Di Desa Wanar, aparatur cenderung hanya mengikuti arahan pemerintah pusat dan belum mampu mengembangkan solusi mandiri, meskipun telah mendapat dukungan berupa materi pelatihan dari pemerintah desa. Kondisi serupa terjadi di Desa Warukulon, di mana kendala utama terletak pada keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM aparatur yang belum memadai. Akibatnya, aparatur di kedua desa ini tidak memaksakan diri untuk berinovasi, meskipun sama-sama mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah desa setempat.

Sementara itu LKD dan Posyandu sebagai bagian dari penyelenggara desa menunjukkan inovasi-inovasi baru yang menekankan pada peran masyarakat dalam setiap kegiatan yang ada. Tidak hanya itu, masyarakat diajak untuk ikut berdiskusi untuk memustuskan solusi yang tepat pada permasalahan yang ada. Dengan partisipasi dan kolaborasi aktif tersebut mampu mewujudkan solusi yang tepat sasaran tanpa mencederai aturan yang ada.

Meski Karang Taruna di Desa Wanar belum mampu berinovasi karena masih baru, PKK menunjukkan kinerja lebih aktif dengan menciptakan solusi inovatif untuk masalah ibu rumah tangga dan masyarakat melalui forum bulanan yang sistematis.



Gambar 2. Alur Perumusan Inovasi Akar Rumput.

Sumber: diolah oleh Peneliti (2024)

Berbeda dengan Wanar, LKD Desa Warukulon justru menampilkan dinamika lebih baik melalui inovasi berbasis masyarakat - Karang Taruna berhasil menggerakkan partisipasi warga dalam program santunan anak yatim dan donor darah kolaboratif dengan PMI, sementara Posyandu fokus pada inovasi spesifik seperti pencegahan stunting. Perbedaan ini menunjukkan bahwa efektivitas inovasi LKD dipengaruhi oleh faktor kematangan organisasi dan kemampuan adaptasi dengan kebutuhan lokal.

Inovasi akar rumput menjadi salah satu aspek untuk melihat bagaimana kapasitas berinovasi masyarakat luas terutama dari kalangan bawah tanpa terkecuali (Zhang & Mahadevia, 2012). Melalui inovasi akar rumput yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wanar maupun Desa Warukulon memiliki manfaat-manfaat tersendiri. Manfaat dari adanya inovasi pasar rumput di masyarakat, yaitu:

- Mempelajari dan mengadaptasi inovasi lokal yang bersifat *open source* untuk diterapkan di wilayah lain. Dengan melakukan ini, dapat memperluas dan mengembangkan inovasi yang telah ada dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan tiap masing-masing tempat.
- Menyatukan kearifan tradisional dengan inovasi modern untuk penyempurnaan solusi. Hasil dari kolaborasi ini tetap relevan dengan permasalahan yang ada namun tidak menghilangkan unsur keunikan dan tradisi yang ada.
- Memanfaatkan jaringan pengetahuan terorganisir untuk atasi masalah lokal. Melalui pemanfaatan jaringan pengetahuan yang kini mudah di akses melalui buku, data maupun jejaring sosial dapat menjadi pilihan untuk menjadi solusi alternatif.
- Membangun kemandirian masyarakat dalam berinovasi. Masyarakat akan mampu mengatasi segala macam bentuk kendala yang terjadi dalam bermasyarakat dengan memanfaatkan unsur-unsur lokal yang ada di sekitar.

Inovasi akar rumput mendorong transformasi lokal ke arah yang lebih baik. Penyebarannya di lingkungan lokal merepresentasikan bagaimana inovasi diterapkan di lingkungan sosial yang baru. Inovasi akar rumput mengajak masyarakat lokal untuk belajar cara mengambil alih situasi melalui pengembangan inovasi yang ada. Gerakan kesadaran ini memastikan masyarakat mendapatkan pengetahuan, wawasan, dan pemberdayaan. Dengan mendapatkan pengetahuan serta pemberdayaan yang ada, masyarakat mampu merumuskan inovasinya secara mandiri melalui kolaborasi antar masyarakat dan aksi nyata (Wibawa, 2025). Kemampuan berinovasi yang ditunjukkan baik dari pihak aparaturnya maupun LKD tidak luput dari campur tangan Pemerintah Desa sebagai fasilitator utama dalam menggerakkan inovasi yang ada. Pemerintah Desa turut memfasilitasi secara materil maupun lainnya untuk mendorong masyarakat setempat merancang solusi yang sesuai dengan kebutuhan (Kim, 2022). Adanya dukungan fasilitas ini akan mampu memotivasi masyarakat agar dapat terus berinovasi kedepannya.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa kapasitas berinovasi dalam penyelenggaraan desa bergantung pada peran strategis Pemerintah Desa sebagai fasilitator utama, kualitas sumber daya manusia, dan partisipasi aktif masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan. Inovasi yang muncul dari Karang Taruna, PKK, dan Posyandu menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif antara kelembagaan dan masyarakat mampu menghasilkan solusi adaptif terhadap kebutuhan lokal. Selain itu, regenerasi kepemimpinan dan penguatan kapasitas organisasi menjadi faktor krusial dalam menjaga keberlanjutan inovasi. Dengan demikian, inovasi desa tidak hanya bersumber dari instruksi struktural, tetapi juga dari integrasi antara kepemimpinan transformatif, partisipasi masyarakat, dan pemberdayaan berbasis lokal. Temuan ini memperkaya kerangka teoritik bahwa inovasi sosial dan akar rumput dapat membentuk model tata kelola desa yang adaptif dan berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam pembuatan artikel jurnal ini yakni mentor magang Dr. Imam Radianto Anwar Setia Putra S.T., M.M yang telah membimbing selama proses penulisan, kemudian Ibu Dra. Ec. Nuruni Ika Kusuma W., M.M. selaku dosen pembimbing magang, dan seluruh jajaran aparaturnya, LKD, maupun posyandu dari Desa Warukulon maupun Desa Wanar yang turut berkontribusi.

Referensi

- Abdolhosseinzadeh, M., Mohammadi, F., & Abdolhamid, M. (2023). Identifying and prioritizing barriers and challenges of Social Innovation implementation in the Public Sector Identificando y priorizando las barreras y los retos de la implementación de la Innovación Social en el Sector Público. *Epsir (European Public & Social Innovation Review)*, 8(1), 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.31637/epsir-2023-227>
- Astuti, P. (2017). *Managing Village Governance Based On Mutual Assistance (Gotong Royong)*. Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/iconeg-16.2017.51>
- Caridà, A., Colurcio, M., & Melia, M. (2022). Digital platform for social innovation: Insights from volunteering. *Creativity and Innovation Management*, 31(4), 755–771. <https://doi.org/10.1111/caim.12499>
- Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation. In *Administrative Science Quarterly* (Vol. 35, Issue 1). <https://doi.org/10.2307/2393553>

- Dwihastari, S. (2019). Analisis Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(2), 215-225. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v6i2.15907>
- Eid, Yasmeen H.A., El-Bendary, Azza T., & Mohamed H.A. (2023). Local Community Participation in Social Innovation Initiatives for Enhancing the Quality of Life: A Case Study in Rural Egypt. *Scientific Journal of Agricultural Sciences*, 5(2), 103-120. <https://doi.org/10.21608/sjas.2023.203645.1290>
- Grice, J. C., Davies, A., Patrick, R., & Norman, W. (2012). *Defining Social Innovation*. <https://socialinnovationexchange.org/legacy/defining-social-innovation-tepsie/>
- Gupta, A. K., Sinha, R., Koradia, D., Patel, R., Parmar, M., Rohit, P., Patel, H., Patel, K., Chand, V. S., James, T. J., Chandan, A., Patel, M., Prakash, T. N., & Vivekanandan, P. (2003). Mobilizing grassroots' technological innovations and traditional knowledge, values and institutions: Articulating social and ethical capital. *Futures*, 35(9), 975-987. [https://doi.org/10.1016/S0016-3287\(03\)00053-3](https://doi.org/10.1016/S0016-3287(03)00053-3)
- Judjianto, L., Damanik, F. H. S., Kusnadi, I. H., Ahmadun, A., & Leuwol, N. V. (2023). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Publik: Menilai Efektivitas Model Keterlibatan Warga. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(2), 1779-1787. <https://doi.org/10.36312/jcm.v3i2.2367>
- Kim, S. (2022). A participatory local governance approach to social innovation: A case study of Seongbuk-gu, South Korea. *Environment and Planning C: Politics and Space*, 40(1), 201-220. <https://doi.org/10.1177/23996544211005784>
- Kushadajani, K., & Permana, I. A. (2020). Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Desa: Peran Kepemimpinan Lokal dalam Perspektif Relasi Antar Aktor. *JIIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 70-80. <https://doi.org/10.14710/jiip.v5i1.7318>
- Maldonado-Mariscal, K. (2023). Grassroots innovation and social innovation in perspective. In *Frontiers in Sociology* (Vol. 8). Frontiers Media SA. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2023.1247293>
- Meidityas, G. R., & Sumaryana, A. (2024). Kapasitas Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS)*, 8(2), 1-18. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS/search/authors/view?firstName=Ganis&middleName=Rana&lastName=Meidityas&affiliation=Program%20Studi%20Administrasi%20Publik%2C%20Fakultas%20Ilmu%20Sosial%20dan%20Ilmu%20Politik%2C%20Universitas%20Padjadjaran.&country=ID>
- Moridu, I., Doloan, A., Hartaty Posumah, N., Hadiyati, R., Kune, D., & Yadasang, R. M. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Inovasi Sosial dan Kewirausahaan Sosial dalam Menangani Masalah Sosial. *Eastasouth Journal of Effective Community Services*, 2(1), 42-53. <https://doi.org/10.58812/ejecs.v2i01>
- Portales, L. (2019). Social Innovation: Origins, Definitions, and Main Elements. In *Social Innovation and Social Entrepreneurship* (pp. 1-14). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-13456-3_1
- Putra, I. R. A. S., & Iskandar, D. S. (2013). Peningkatan Kapasitas Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri. *Jurnal Bina Praja*, 5(3), 177-188. <https://doi.org/10.21787/jbp.05.2013.177-188>
- Rahmadhita, K. (2020). Permasalahan Stunting dan Pencegahannya Stunting Problems and Prevention. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 11(1), 225-229. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v10i2.253>
- Rahmawati. (2020). Komunitas Baca Rumah Luwu Sebagai Inovasi Sosial Untuk Meningkatkan Minat Baca Di Kabupaten Luwu. *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*. 4(2), 158-168. <https://doi.org/10.21831/diklus.v4i2.32593>.
- Ramli, & Kusmaryani, W. (2024). LUMBIS, KABUPATEN NUNUKAN Reggio Emilia Approach: Building Literacy Foundation for Millennial Generation in the Border Area. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Borneo*, 8(3). <http://jurnal.borneo.ac.id/index.php/jpmb>
- Riyanto, M., & Kovalenko, V. (2023). Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 15(2), 374-388. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.374-388>
- Seyfang, G., & Smith, A. (2007). Grassroots innovations for sustainable development: Towards a new research and policy agenda. *Environmental Politics*, 16(4), 584-603. <https://doi.org/10.1080/09644010701419121>
- Smith, A., & Stirling, A. (2018). Innovation, sustainability and democracy: An analysis of grassroots contributions. *Journal of Self-Governance and Management Economics*, 6(1), 64-97. <https://doi.org/10.22381/JSME6120183>

- Suprayoga, S., & Mardiana, F. (2023). Karang Taruna: Pemberdayaan, Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas SDM. *SEMANGGI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(01), 85-97. <https://doi.org/10.38156/sjpm.v2i01.238>
- Susu, M. T., Tokan, F. B., & Lamawuran, Y. D. (2024). Penguatan Kelembagaan Karang Taruna untuk Meningkatkan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Desa Sandosi Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 7(9), 4001–4011. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v7i9.15954>
- Tse, P. A. D., Suprojo, A., & Adiwidjaja, I. (2017). Peran Kader Posyandu Terhadap Pembangunan Kesehatan Masyarakat. *JISIP: Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Sosial*, 6(1), 60–62. <https://doi.org/10.33366/jisip.v6i1.372>
- Vercher, N. (2022). The Role of Actors in Social Innovation in Rural Areas. *Land*, 11(5), 1–24. <https://doi.org/10.3390/land11050710>
- Wadu, L. B., Ladamay, I., & Yosefina Dadi, M. (2018). Faktor Pendukung dan Penghambat Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Meningkatkan Keterampilan Warga Negara Melalui Program Pokok PKK. *Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 8(1), 62–71. <https://doi.org/10.21067/jip.v8i1.2244>
- Wibawa, M. L. S. A. (2025). Kepemimpinan Akar Rumpun: Belajar Dari Pengalaman Kasus Decky di Desa Ledok Tukangan. *JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara)*, 9(1), 110-120. <https://doi.org/10.56071/jian.v9i1.1178>
- Wibowo, A., Palijama, M. L., Kutaneegara, P. M., Cahyono, E., & Tillah, M. (2021). The Grassroots Innovation of Customary Forest Management: A Case Study of Kulawi-Marena Community in Sigi Regency, Central Sulawesi. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 9(3). <https://doi.org/10.22500/9202135204>
- Yang, Y., & Wu, F. (2022). The Sustainability of the Project-Driven Innovation of Grassroots Governance: Influencing Factors and Combination Paths. *Sustainability*, 14(24), 16862; <https://doi.org/10.3390/su142416862>
- Yendra, M. (2022). INOVASI PROGRAM SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN KARANG TARUNA FAJAR MENYINGSING KELURAHAN BALAI GADANG, KECAMATAN KOTO TANGAH, KOTA PADANG. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 2(4), 358–369. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v2i4.1126>
- Zhang, L., & Mahadevia, D. (2012). Institutional architecture for grassroots innovations: a case of Hua County, China. *Innovation and Development*, 2(1), 175–188. <https://doi.org/10.1080/2157930x.2012.671907>